

Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)

ZULKIFLI RUSBY*
ZULFADLI HAMZAH**
HAMZAH***

*Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR)
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian marpoyang Pekanbaru 28284
e-mail: zulkiflirusby@yahoo.com Hp: 081378436270

**Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284
e-mail: zulfadlihamzah@gmail.com

***Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR)
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284
e-mail: drs_hamzah_mag@yahoo.co.id

Abstrak: BMT adalah lembaga keuangan yang berhubungan dengan pengusaha kecil untuk tambahan modal bagi kegiatan usahanya. Lembaga ini menyediakan dana untuk menolong pengusaha kecil yang tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank. Selanjutnya, adanya BMT ini ditujukan untuk membantuk perekonomian masyarakat golongan ekonomi kebawah, sehingga menereka terjauh dari rentenir yang kerap kali meminta imbalan berupa bunga pinjaman yang tinggi. Sejak munculnya BMT ini pada tahun 1992, lembaga ini ternyata disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat telah terbantu secara ekonomi karena adanya BMT ini; namun, ada juga yang usahanya tetap gagal dan akhirnya bangkrut. Penyebab kegagalan usaha mereka biasanya dikarenakan oleh banyaknya kendala yang muncul dalam kegiatan usaha mereka. Maka dari itu, melalui penelitian ini, beberapa BMT di Pekanbaru telah diseleksi kemudian di adakan penelitian studi kasus yang menganalisa tentang faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh BMT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytic Network Process (ANP). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pakar akademisi, praktisi dan undang-undang yang mana memiliki pemahaman khusus tentang kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya SDM merupakan faktor internal utama sehingga perlu adanya pelatihan dan pendidikan tambahan. Oleh karena itu, permasalahan ini sebaiknya segera diselesaikan dengan memberikan peraturan khusus tambahan sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan baik oleh BMT.

Kata Kunci: *BMT, ANP, Microfinancing, Islamic Financial Institution.*

PENDAHULUAN

Sebagian besar lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia merupakan lembaga keuangan yang berbasis konvensional yang mempraktekkan konsep bunga (riba) pada setiap produk yang ditawarkan. Namun sejak tahun 1992, telah muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah yang melarang praktik konsep bunga (riba) pada operasional mereka. Lembaga keuangan syariah itu ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan atas inisiatif dari MUI. Pendirian lembaga keuangan syariah ini menjadi batu loncatan bagi MUI untuk mendirikan lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Maal Wat tamwil (BMT).

BMT ialah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "Baitul Maal" dan Baitul Tamwil" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul maal berarti BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai fungsi untuk menerima dana Zakat, Sedekah, Infaq dan Waqaf dan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut. Sedangkan pada konsep Baitul Tamwil, BMT mempunyai peranan sebagai lembaga bisnis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented) seperti membuka Toserba (toko serba ada) atau menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat. Namun jika kita lihat prakteknya dilapangan, BMT lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Pada hakikatnya konsep BMT tersebut sudah ada di Indonesia sejak tahun 1992 yang dipelopori oleh Aries

Mufti dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jakarta Pusat. Walau bagaimanapun, BMT secara resmi didirikan pada tahun 1995 setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Islam pertama di Indonesia dibentuk. Pendirian BMT ketika itu didirikan berdasarkan inisiatif dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan BMI (Bank Muamalat Indonesia). dan BMT mulai beroperasi di bawah pengawasan PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) pada tahun yang sama.

Dan ketika mulai tahun tersebutlah, BMT mulai berkembang dan tumbuh dengan pesat sebagai alternatif lembaga keuangan bagi mereka yang mempunyai pendapatan rendah untuk terhindar dari jeratan rentiner. Ini terbukti dengan berdasarkan data yang di peroleh dari PINBUK pada tanggal 12 februari 1998, Dimana ketika itu terdapat 2000 unit BMT di Indonesia namun yang hanya terdaftar hanya 384 unit dengan total jumlah pemilik modalnya sebanyak 79,325 orang dan total penerima pembiayaan sebanyak 28,430 dengan total jumlah pembiayaan sebesar Rp 11 triliun (Karim, 2009).

Dengan pesatnya perkembangan BMT ketika itu, BMT menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai peranan yang penting di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Dan pendirian BMT juga berdampak positif bagi ekonomi kerakyatan yang berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah besar bagi bangsa ini. Menurut subkhan (2008) terdapat sekitar 3 juta nasabah BMT yang mendapatkan pembiayaan dari BMT seluruh Indonesia. Ada tiga alasan mengapa BMT dapat berkembang dan tumbuh dengan pesat, yaitu: (1) Tingginya permintaan dari

masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT karena mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman dari sektor perbankan. Ditambah lagi dengan ketatnya prosedur dan aturan yang di tentukan oleh pihak bank; (2) Tingginya keinginan masyarakat Muslim yang mengharuskan bertransaksi pada prinsip-prinsip syariah. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut; dan (3) Kesuksesan dari beberapa BMT di Indonesia membuat masyarakat juga ingin mendirikan institusi yang sama. Ditambah lagi dengan pendirian

institusi BMT tersebut relatif sangat mudah dan tidak perlu modal yang besar.

Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan BMT ketika itu mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Namun euforia kesuksesan itu tidak di sikapi dengan bijaksana, karena dari sekian banyak BMT yang didirikan oleh masyarakat, tidak semua dapat bertahan dan beroperasi secara sewajarnya bahkan ada beberapa BMT yang mengalami kebangkrutan. Permasalahan ini dapat kita gambarkan pada tpabel dibawah ini :

Tabel 1
Perkembangan dan Pertumbuhan BMT di Indonesia

No.	Kota	Tahun Pendirian dan Total BMT	Tahun Operasional BMT dan Total BMT yang Masih Akhif
1	Jambi	1995–2008 8 Unit BMT	2008 3 unit BMT
2	Ciamis	2000 42 unit BMT	2008 7 unit BMT
3	Tasik Malaya	2000 50 unit BMT	2008 12 unit BMT
4	Bandung	2000 32 unit BMT	2008 8 unit BMT

Sumber : Syahputra (2010) & Gampito (2008)

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan BMT di kota Jambi dari tahun 1995 sampai tahun 2008 mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 8 BMT yang didirikan hanya 3 BMT saja yang masih beroperasi secara aktif (Syahputra, 2010). pada tahun 2000 di kecamatan Ciamis terdapat 42 BMT, namun sekarang hanya tinggal 7 BMT. Di kawasan Tasik Malaya terdapat 50 BMT dan yang tersisa kini hanya 12 BMT.

Kasus yang sama juga terjadi di kota Bandung, dari 32 BMT sekarang hanya ada 8 BMT yang masih beroperasi (Gampito, 2008). Dan berdasarkan dari pernyataan PINBUK pada akhir tahun 1997, terdapat 1,502 BMT yang tidak berkembang secara baik bahkan ada yang sampai bankrupt.

Fenomena diatas juga terjadi pada BMT yang ada di kota Pekanbaru. Dari 8 BMT yang didirikan hanya 5 BMT

yang masih beroperasi seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Perkembangan dan Pertumbuhan BMT di Pekanbaru

No.	Nama BMT	Lokasi	KET
1	Al Amin	Jalan Pasir Putih	Aktif
2	Ittihad	Rumbai	Aktif
3	Sakinah	Gading Marpoyan	Aktif
4	Septa Bina Usaha	Jalan Kaharudin Nasution	Aktif
5	Madani	Jalan Perkutut Sukajadi	Non Aktif
6	Bina Insan Cipta	Jalan Paus	Non Aktif
7	Mika Arta	Jalan Sekolah	Aktif
8	Munawwarah	Kampus UIR	Non aktif

Sumber : PINBUK Kota Pekanbaru (2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 5 BMT yang masih beroperasi dengan aktif. Kelima BMT tersebut ialah BMT Al Amin, BMT Ittihad, BMT Sakinah, BMT Septa Bina Usaha, BMT Mika Arta. Dan terdapat 3 BMT yang sudah tidak aktif lagi yaitu BMT Munawwarah, BMT Bina Insan Cipta dan BMT Madani. Ini menunjukkan adanya penurunan terhadap perkembangan dan pertumbuhan BMT di kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, perlu sekiranya dilakukan kajian kembali berupa penguraian yang lebih komprehensif dan sistematis mengenai permasalahan yang muncul serta harus dihadapi oleh BMT yang ada di Kota Pekanbaru. Diharapkan penelitian ini akan memberikan dorongan dan keyakinan akan pentingnya kontribusi bersama seluruh entitas masyarakat dalam

bekerja sama meningkatkan upaya pengembangan BMT sebagai penopang ekonomi kerakyatan di Kota Pekanbaru.

Secara rinci, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang permasalahan oleh institusi BMT di Kota Pekanbaru; (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling dominan/signifikan yang menjadi permasalahan bagi institusi BMT di Kota Pekanbaru; dan (3) Solusi serta langkah rekomendasi apa yang selayaknya ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh institusi BMT di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pembuat regulasi tentang BMT, Peneliti, Pemilik BMT di Pekanbaru dan Pemilik lembaga keuangan lainnya.

Tabel 3
Peranan Berbagai Pihak terhadap Kebikan BMT

Pemerintah	Sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan dan peraturan tentang BMT.
Peneliti	Untuk menambah informasi dan wawasan tentang BMT.
Pemilik BMT di Pekanbaru	Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan performa BMT.
Pemilik Lembaga keuangan lainnya	Sebagai bahan pertimbangan ketika ingin melakukan kontrak kerjasama dengan BMT.

KONSEP TEORI

Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil lebih dikenalinya dengan sebutan BMT. Yang terdiri dari dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha (Ridwan, 2004: 126). Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal atau harta. Jadi baitul tamwil di maknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan.

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan sadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Danupranata, 2006: 56).

Menurut Ridwan, baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dan sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Selanjutnya dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT adalah merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial (Sholahuddin, 2006: 75).

Definisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni "Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah berdasarkan prinsip-prinsip Islam" (PINBUK, tt: 1).

Dari definisi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa BMT.

Merupakan Lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek Baitul Maal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT (PINBUK, tt: 2).

Gampito (2008) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menjadi problematika operasionalisasi Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) di Indonesia. adapun permasalahan yang muncul dari internal BMT ialah (1) kurangnya modal dan sumber pendanaan yang di miliki, (2) rendahnya performa staff BMT, (3) tidak adanya inovasi pada produk BMT, (4) kurangnya fasilitas yang berbasis TI (teknologi informasi) yang di gunakan oleh BMT. sedangkan permasalahan yang muncul dari eksternal BMT ialah (1) ketatnya persaingan sesama BMT, (2) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BMT, (3) rendahnya networking dan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, (4) lemahnya pengawasan dan bimbingan dari pemerintah dan MUI.

Mu'alim and Abidin (2005) yang melakukan penelitian tentang profesionalisme praktisi BMT di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini ialah sebagai berikut : *pertama*, Pemaknaan profesionalisme yang banyak ditemukan di lapangan menunjukkan, bahwa kebanyakan praktisi BMT memberikan pandangan yang bersifat praktis. Profesionalisme praktisi BMT cenderung dimaknai dalam konteks kualitas pelayanan yang

diberikan oleh BMT terhadap nasabahnya. Artinya, tolok ukur profesionalisme yang paling besar terletak pada kualitas pelayanan. *Kedua*, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap profesionalisme praktisi BMT, yaitu: (1) Pemahaman terhadap Konsep Keuangan Syari'ah, (2) Kendala Operasional Sistem Keuangan Syari'ah, (3) Manajemen SDM (Pembagian Peran dan Fungsi), (4) Penampilan (*Performance*) BMT di antara Persaingan Bisnis Perbankan, (5) Ketidaksesuaian antara Jumlah Tabungan dan Pembiayaan, (6) Nisbah Bagi Hasil Yang Kurang Menguntungkan Nasabah, (7) Mudharabah Yang Kurang Menjadi Prioritas BMT. Sementara, diantara kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme antara lain; (1) Penguasaan Konsep Keuangan Syari'ah dari segi teori maupun dari segi prakteknya. (2) Kemampuan Melakukan uji kelayakan usaha dengan sangat baik, (3) Kemampuan menjelaskan konsep keuangan syari'ah secara baik. (4) Kemampuan dalam penggunaan Sistem komputerisasi pelayanan BMT, (5) Peningkatan pelatihan-pelatihan Perbankan Syari'ah secara kuantitas dan kualitas, (6) Pengembangan produk-produk BMT secara lebih variatif dan menarik.

Adnan Widarjono, dan Anto (2003) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BMT terbaik di Indonesia. Penelitian ini memperoleh data dari 47 BMT terbaik di Indonesia yang berasal dari lima provinsi yang berbeda, yaitu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi kinerja BMT yaitu (1) gaji dari manajemen, (2) pendidikan dan (3) keterampilan manajemen yang dimiliki oleh staff BMT yang terlibat

dalam operasi sehari-hari, dan (4) atribut produk. Sedangkan Faktor lain seperti jam kerja dan jumlah produk memiliki korelasi negatif terhadap kinerja BMT itu. Salah satu implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa ada kebutuhan yang serius untuk meningkatkan keterampilan manajemen serta kebutuhan untuk memperbaiki tingkat gaji manajer.

Sa'roni dan Hosen (2012) yang mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan BMT. Metode penelitian ini adalah deskripsi keuangan dan analisis karakteristik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penentu utama keberhasilan BMT adalah kemampuan manajemen keuangan, karakteristik pelanggan mencari pembiayaan, kemampuan manajemen risiko, keakraban antara pelanggan dan tim manajerial BMT, Teknologi Informasi (TI), dan networking.

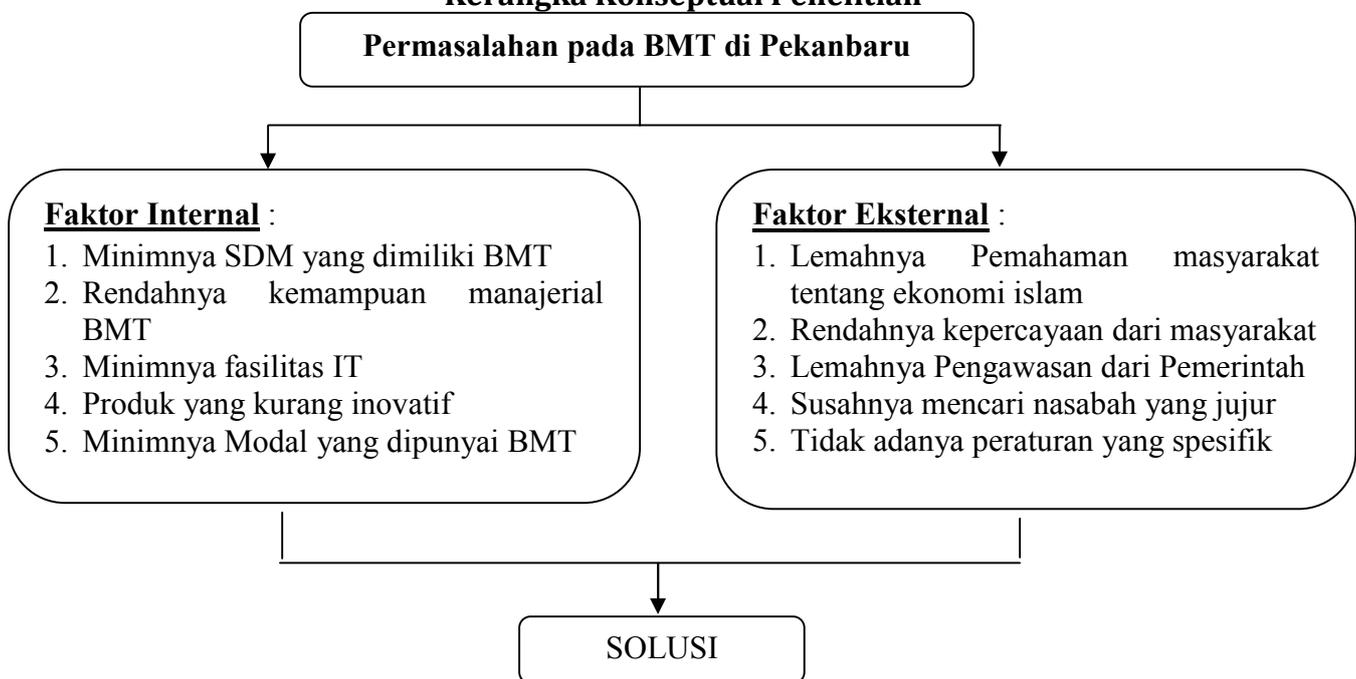
PINBUK (1999) yang juga melakukan penelitian tentang evaluasi perkembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dan BMT. Penelitian ini pada dasarnya berkaitan dengan pertanyaan penelitian berikut : (1) apa saja faktor-faktor eksternal yang menghambat dan mendukung pengembangan Kopontren dan BMT ?, (2) apa jenis lembaga keuangan menjadi pesaing potensial dan serius bagi Kopontren dan BMT di daerah mereka ?. Penelitian dilakukan berdasarkan survei terhadap 24 unit BMT dan 30 unit Kopontren di tiga provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga faktor eksternal yang mungkin mendukung keberadaan BMT dan Kopontren. Mereka adalah : (1) hati nurani dan kesediaan umat Islam untuk memanfaatkan dan membantu lembaga keuangan Islam, (2) BMT dan Kopontren pada dasarnya melayani pelanggan dengan baik, maupun dalam memberikan produk atau dalam

mengumpulkan kewajiban pelanggan, (3) BMT dan Kopontren memberikan prosedur yang sederhana untuk memperoleh pembiayaan.

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala/hambatan dari faktor eksternal yaitu (1) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BMT, (2) ketidakpahaman masyarakat tentang peran sosial dan keagamaan dari BMT

dan Kopontren, (3) di temukan tidak adanya komoditas unggulan yang bisa dibiayai, (4) kurangnya pengawasan dan bantuan pembangunan dari pemerintah, (5) tidak adanya lembaga independen yang dapat memberikan jaminan dalam kasus kesulitan likuiditas, dan (6) sebagian besar nasabah BMT bekerja di sektor retail, dan hampir tidak ada yang bekerja di sektor manufaktur.

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian



METODE

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi yang memahami tentang manajemen dan perkembangan BMT di Kota Pekanbaru. Studi kualitatif memiliki pengertian sebagai suatu proses atau usaha untuk memahami masalah-masalah sosial berdasarkan gambaran keseluruhan yang kompleks, melalui informasi yang dilaporkan dari pandangan informan dan dilakukan dalam situasi yang

natural. Maka metode yang tepat untuk penelitian ini adalah dengan ANP. *Analytic Network Process* (ANP) adalah teori matematis yang pertama yang membuat metode ini memungkinkan kita menghadapi factor-faktor *dependence* serta *feedback* secara sistematis. Dalam bahasa lain, ANP merupakan satu dari metode *multiple criteria decision making* (MCDM) yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty. Metode ini merupakan pendekatan baru metode kualitatif yang merupakan perkembangan lanjutan dari metode terdahulu yakni *Analytic Hierarchy*

Process (AHP). Kelebihan ANP dari metodologi yang lain adalah kemampuannya untuk membantu kita dalam melakukan pengukuran sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan.

Wawancara dan studi literatur merupakan sumber data untuk penyusunan kerangka model ANP dari permasalahan yang dihadapi oleh BMT di Kota Pekanbaru. Kerangka ANP yang telah disusun baru dapat diselesaikan setelah tersedia data maupun informasi preferensi/tanggapan/pendapat yang diwakili oleh para analis/pakar/praktisi ekonomi Islam tentang permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperoleh data preferensi tersebut, digunakan (1 kuesioner/wawancara langsung) kepada para pakar dan praktisi. Pengumpulan data ini dititikberatkan bagi praktisi maupun pakar untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk analisa kuantitatif dalam kerangka analisis yang akan digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode ANP, ada 2 tahap pengumpulan data. Pada tahap awal ini, teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi adalah dengan melakukan indept interview/wawancara dengan beberapa responden yang telah dipilih. Responden merupakan akademisi, regulator, dan praktisi BMT yang paham tentang perkembangan BMT di Kota Pekanbaru. Wawancara awal ini untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai masalah dan sebagai sumber data awal dalam menyusun model kerangka ANP. Tahap selanjutnya setelah kerangka ANP disusun yaitu merancang kuisisioner

sesuai dengan kerangka ANP yang telah dibuat. Kuisisioner tersebut nantinya disebarkan kepada para ahli yang benar-benar menguasai masalah tersebut. Penyebaran kuisisioner ini diperlukan untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan skala ratio. Dalam pengumpulan data ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing responden.

Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari Tujuh orang, dengan pertimbangan bahwa mereka cukup berkompeten dalam mewakili keseluruhan populasi. Mereka adalah: (1) Direktur BMT Al Amin: Praktisi A; (2) Direktur BMT Sakinah: Praktisi B; (3) Ketua PINBUK Pekanbaru: Praktisi C; (4) Dinas Koperasi Pekanbaru: Pemerintah A; (5) MUI Pekanbaru: Regulator B; (6) Dosen Universitas Islam Riau: Academician A; dan (7) Dosen Universitas Islam Riau: Academician B.

Dalam analisis ANP jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survei ini adalah akademisi, regulator, dan praktisi BMT yang paham tentang perkembangan BMT di Kota Pekanbaru.

Pertanyaan dalam kuisisioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya dilihat dari satu sisi. Skala numerik 1-9 yang digunakan merupakan terjemahan dari penilaian verbal.

Tabel 4
Perbandingan Skala Verbal dan Skala Numerik

SKALA VERBAL	SKALA NUMERIK
Amat sangat lebih besar pengaruhnya	9
	8
Sangat lebih besar pengaruhnya	7
	6
Lebih besar pengaruhnya	5
	4
Sedikit lebih besar pengaruhnya	3
	2
Sama besar pengaruhnya	1

Sumber: Ascarya (2005)

Setelah data yang dikumpulkan telah disusun dalam bentuk model kerangka ANP serta hasil data kuesioner pun telah terkumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis-*analisis* terhadap hasil yang diperoleh. Alat analisis ini adalah ANP dan diolah dengan menggunakan software "*Super Decision*".

PEMBAHASAN

Hasil angket yang telah disebarakan ke Responden akan di olah kembali dengan menggunakan software *super decision 1.6.0* dan hasilnya akan di tabulasikan kedalam *microsof excel* seperti dibawah ini :

Table 5
Hasil ANP

DESKRIPSI	AKADEMISI		PRAKTISI		PEMERINTAH		TOTAL	
	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R
INTERNAL	0.021	2	0.028	1	0.016	2	0.023	2
EKSTERNAL	0.029	1	0.027	2	0.022	1	0.027	1
INTERNAL								
Minimnya SDM BMT	0.46	1	0.50	1	0.45	1	0.47	1
Rendahnya Managerial Skill	0.17	3	0.06	5	0.20	2	0.13	3
Minimnya fasilitas IT	0.05	5	0.07	4	0.08	4	0.06	5
Produk yang kurang Inovatif	0.21	2	0.25	2	0.07	5	0.19	2
Minimnya Modal BMT	0.08	4	0.09	3	0.16	3	0.11	4
EXTERNAL								
Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam	0.10	3	0.14	3	0.24	2	0.16	4
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap performa BMT	0.08	4	0.11	4	0.45	1	0.19	2
Kurangnya pengawasan dari	0.24	2	0.21	2	0.11	3	0.18	3

Pemerintah dan MUI									
Susahnya mencari nasabah yang jujur	0.05	5	0.05	5	0.09	4	0.06	5	
Tidak adanya peraturan yng spesifik tentang BMT	0.49	1	0.46	1	0.07	5	0.36	1	
SOLUSI & ALTERNATIF									
Meningkatkan kualitas SDM	0.41	1	0.41	1	0.38	1	0.40	1	
Meningkatkan fasilitas IT	0.07	4	0.09	4	0.15	3	0.101	5	
Membuat inovasi produk	0.03	6	0.10	3	0.24	2	0.12	3	
Perlu sosialisasi dan promosi tentang operasional BMT	0.06	5	0.04	6	0.065	5	0.05	6	
Meningkatkan pengawasan dari Pemerintah dan MUI	0.19	3	0.07	5	0.06	6	0.106	4	
Membuat peraturan baru tentang BMT	0.20	2	0.24	2	0.07	4	0.18	1	

Note : NR adalah Nilai Rata-rata

R adalah ranking untuk setiap nilainya

Pandangan Akademisi

Berdasarkan pendapat para akademisi, permasalahan utama yang menjadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan BMT di pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh BMT yang ada di Pekanbaru. Sedangkan permasalahan yang bersumber dari external BMT, para akademisi berargumen bahwa tidak adanya peraturan yang spesifik yang mengatur tentang BMT menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian oleh berbagai pihak khususnya oleh Pemerintah supaya BMT yang ada di Pekanbaru dapat berkembang dan tumbuh secara signifikan. Berdasarkan hasil pembahasan, para akademisi setuju untuk dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia BMT di pekanbaru melalui pendidikan dan pelatihan secara intensif. Dan para akademisi juga bersetuju dengan

dibentuknya peraturan yang baru yang lebih spesifik mengatur tentang BMT. Hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai pembuat peraturan.

Pandangan Praktisi

Tidak jauh berbeda dengan akademisi, para praktisi juga bersetuju bahwa rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh BMT menjadi faktor penting yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan BMT yang ada di Pekanbaru. Dan tidak adanya peraturan yang spesifik mengatur tentang BMT selain dari kurangnya inovasi produk pada BMT dan kurangnya sosialisasi tentang BMT merupakan isu penting yang menjadi perdebatan di kalangan para praktisi. Para praktisi berargumen bahwa akan perlunya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para staff/karyawan BMT supaya lebih professional. Para praktisi juga

berharap akan adanya niat baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan untuk membentuk peraturan khusus yang spesifik mengatur tentang BMT sehingga institusi BMT mempunyai payung hukum tersendiri.

Pandangan Pemerintah

Sama halnya dengan akademisi dan praktisi, pemerintah juga bersetuju bahwa permasalahan utama yang bersumber dari internal BMT yang harus segera diatasi adalah lemahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh BMT yang ada di Pekanbaru. Mereka berpendapat bahwa sebagian besar karyawan/staff BMT yang ada di Pekanbaru tidak memiliki kompetensi sebagai praktisi syariah yang tidak hanya mengerti tentang konsep bisnis semata tetapi juga memahami tentang aspek syariah dalam operasional BMT. Sedangkan permasalahan yang bersumber dari eksternal BMT yang harus segera diatasi adalah rendahnya kepercayaan dari masyarakat terhadap performa/kinerja BMT. Mereka beranggapan bahwa kinerja/performa BMT akan berdampak terhadap kepercayaan publik. Dimana masyarakat akan takut untuk menginvestasikan uangnya kepada BMT yang mempunyai kinerja/performa yang buruk begitu juga sebaliknya. Pemerintah berharap supaya praktisi BMT dapat meningkatkan kualitas staff/karyawan BMT melalui pelatihan dan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan performa dan kinerja BMT.

SIMPULAN

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan diatas, dapat di simpulkan bahwa dari sisi internal BMT, lemahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh BMT

yang ada di pekanbaru menjadi permasalahan yang sangat krusial yang harus segera diatasi oleh para praktisi BMT. Karena SDM merupakan elemen penting dalam aktivitas bisnis suatu institusi. Sedangkan dari sisi eksternal BMT, tidak adanya peraturan yang spesifik yang mengatur tentang BMT juga menjadi permasalahan yang serius yang harus segera diatasi. Karena permasalahan ini masih menjadi perdebatan yang hangat dari berbagai pihak, baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan.

Solusi yang menjadi rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh BMT di pekanbaru dengan mengadakan penelitian dan pelatihan. Dan hasil penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk dibentuknya peraturan baru yang mengatur secara spesifik tentang BMT.

Untuk penelitian selanjutnya, baiknya dibuat strategi bisnis berskala jangka pendek, menengah, jangka panjang, dengan bersinerginya regulator, praktisi, dan akademisi untuk kemajuan pertumbuhan dan perkembangan BMT kedepannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpendapatan rendah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, Muhammad Akhyar,. Widarjono, Agus & Anto, M. Bakti Hendri. 2003. *Study on Factors Influencing Performance of The Best Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) in Indonesia*. IQTISAS Journal Islamic Economic Vol. 4, No. 1, p. 13-35.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Cetakan Pertama. Jakarta : Tazkia Institute.

- Ascarya. (2005). *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitati*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Bank Indonesia.
- Danupranata, Gita. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : UPFE-UMY
- Gampito. 2008. *Problematika Operasional BMT*. tersedia : <http://gampito.blogspot.com/2008/06/problematika-operasionaliasi-BMT.html>.
- Karim, Adiwarmarman A., 2009 "Permasalahan dan Konsep Syariah", di akses dari : <http://ekisopini.blogspot.com/2009/10/permasalahan-dan-konsep-syariah-bmt.html>, pada tanggal 12 januari 2012 pukul 10.00.
- Karim, Adiwarmarman A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Kerjasama dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Cipasung Ciputat : CV. Gaung Persada
- Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pusat Pembangunan Usaha Kecil dan Kewirausahaan Muhammadiyah. 2002. Pedoman Cara Pendirian BTM dan BMT di Lingkungan Muhammadiyah. Jakarta : Tanpa Nama Penerbit.
- Mu'alim, A. & Abidin, Z. (2005). "Profesionalisme Praktisi BMT di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman." Millah Vol. IV, No.2, p. 68-86.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.
- PINBUK. 1999. *Kajian Evaluasi Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren dan BMT*. Working Paper, jointly published by PINBUK and Proyek Pengembangan dan Pemantapan Koperasi Perkotaan. Dirjen Koperasi Perkotaan, Dep. Kop dan Pengusaha Kecil. Republik Indonesia.
- PINBUK. Tanpa Tahun. *Peraturan Dasar dan Contoh AD ART BMT*. Jakarta : wasantara Net. Id
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press.
- Sa'roni, Lia Syukriyah & Hosen, Muhammad Nadrattuzaman. 2012. *Determinant Factors of the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, august 2012, Vol. 1, No. 4, pp. 36-55.
- Sholahuddin. M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhamamadiyah University Press.
- Subkhan. 2008. *Menunggu Payung Hukum BMT*. tersedia : <http://subkhan.wordpress.com/2008/01/09/menunggu-payung-hukum-BMT/>.
- Syahputra, Rialdi. 2010. *Baitul Maal Wat tamwil (BMT) Mati Suri*. Tersedia : <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/12/17/baitul-maal-wat-tamwil-mati-suri/>.